

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat memiliki kriteria rendah sekali atau dapat dikategorikan kedalam pola instruktif, dimana peran dari pemerintah pusat dalam pembiayaan pelaksanaan program pemerintah daerah lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri. Karena memiliki nilai dari rasio kemandirian keuangan daerah yang lebih kecil dari 25%. Hal ini berarti masih rendahnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pemerintahannya sendiri atau masih tingginya ketergantungan terhadap pihak luar.
2. Rasio derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat selama periode 2014-2019 memiliki rata-rata kurang dari 10% atau hanya mencapai sebesar 6,93 %. Hal tersebut menunjukkan derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat sangat kurang sehingga belum mampu mengelola keuangannya untuk membiayai program-program untuk kesejahteraan masyarakat
3. Rasio efektivitas PAD kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat selama periode 2014-2019 memiliki rata-rata sebesar 89,40 %, sehingga efektifitas pengelolaan PAD yang dimiliki Sumatra Barat selama periode 2014-2019 masih kurang efektif

4. Rasio efektifitas pajak daerah kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat selama periode 2014-2019 memiliki rata-rata sebesar 83,02, artinya efektifitas penerimaan pajak sudah berada pada kategori cukup efektif, namun hal tersebut belum mampu menunjang penerimaan PAD di kabupaten/kota pemekaran di Sumatra Barat..

5.2 Keterbatasan

Pada penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga memerlukan perbaikan pada peneliti-peneliti berikutnya. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 14 % dari variabel dependen. Jumlah tersebut sangat kecil apabila ingin melihat bagaimana keterkaitan antara kinerja daerah pemekaran di Sumatra Barat terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nya. Olehkarena itu masih terdapat faktor atau variabel independen lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti rasio efesiensi PAD, rasio efesiensi pajak daerah, rasio pertumbuhan ekoomi dan rasio keserasian belanja daerah

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan penelitian, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan

1. Bagi pemerintah daerah pemekaran di Sumatra Barat agar lebih bijak mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada dan berupaya untuk meningkatkan penerimaan PAD dengan memanfaatkan potensi daerah yang belum tergali

2. Bagi peneliti berikutnya memperluas sampel penelitian karena penelitian ini hanya melihat bagaimana kinerja dari pemerintah daerah pemekaran yang ada di sumatra barat sehingga hasil penelitain dapat menunjukkan data yang lebih signifikan
3. Peneliti selanjutnya juga dapat melihat bagaimana kinerja belanja pemerintah dalam bidang pendidikan dan kesehatan karena IPM dipengaruhi oleh dua bidang belanja tersebut.

